

PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN ENREKANG

*The Effect Of Regional Revenue And Expenditure Budget Realization On
Economic Growth In Enrekang Regency*

Yasri Tarawiru¹, Fitriani², Nur Wildayanti.B³

Email: yasri.se.ak@gmail.com¹, fitri.fa29@gmail.com², wildacs30@gmail.com³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh realisasi anggaran pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2020, untuk mengetahui belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang 2016-2020, untuk mengetahui realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2020. Menganalisis data tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten enrekang. Metode kuantitatif, Metode regresi linier berganda, yaitu untuk melihat pengaruh pendapatan (X1) dan belanja daerah (X2). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (y).

Hasil penelitian menyatakan dari tabel hasil analisis uji f pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai t hitung > t tabel (-2, 101 < -2, 131) pada taraf signifikan 0,05. Maka ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan dengan harga pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis 1 di terima Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel analisis uji T pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai -t hitung > -t tabel (-1,980 < -2,131) pada taraf signifikan 0,05 maka Ha diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis 2 diterima Dalam penelitian yang berjudul pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi variabel bebas dan terikat yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh secara signifikan. Sehingga hipotesis 3 diterima.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan *Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of the revenue budget realization on economic growth in 2016-2020 period, to find out regional expenditure on economic growth in Enrekang Regency for 2016-2020 period, to find out the regional revenue and expenditure budgets realization has an effect on economic growth in 2016-2020 period. Quantitative (descriptive) analysis method, which analyzes data on the Regional Revenue and Expenditure Budgets realization on economic growth in Enrekang Regency. Quantitative method, multiple linear regression method, namely to see the effect of regional revenue (X1) and expenditure (X2) on economic growth (Y).

The results of the study stated that from the table of results of the f-test analysis, namely the effect of regional revenue on economic growth obtained the value of t-count > t-table (-2,101 < -2,131) at a significant level of 0.05. Then there is a significant effect between revenue and the value of economic growth. So that hypothesis 1 is accepted. Based on the partial test results, on the table of t-test analysis, the effect of regional expenditure on economic growth is obtained by the value of t-count > t-table (-1.980 < -2.131) at a significant level of 0.05, so H_a is accepted, meaning that partially there is a significant effect between regional expenditure and economic growth. So that hypothesis 2 is accepted. In the study entitled the effect of regional revenue and expenditure budgets realization on economic growth in Enrekang Regency. The variable used in this study was the effect of regional revenue and expenditure budgets on economic growth being the independent and dependent variable, namely the regional revenue and expenditure budgets has a significant effect. So that hypothesis 3 is accepted.

Keywords: Revenue Budget, Regional Expenditures and Economic Growth

PENDAHULUAN

Keberadaan APBD berdampak serta menangani pengaruh besar terhadap perekonomian. Misalnya, di era otonomi daerah, setiap pemerintah di daerah Indonesia pernah berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan (pajak, retribusi, dan lain-lain) yang berakibat terjadi *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Ekonomi biaya tertinggi sangat merugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikkan harga, menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akhirnya pemerintah merevisi undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk: menetapkan peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antara daerah, serta kegiatan ekspor dan impor.

APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah. APBD dapat berdampak atau berpengaruh terhadap perubahan harga di Daerah, misalnya: dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikkan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah Daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar Daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari Daerah lain.

APBD dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. APBD berdampak atau berpengaruh terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpang distribusi pendapatan maka APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan di gunakan

pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat di harapkan lebih merata.

Pengelolaan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dieluarkannya undang-undang no. 22 tahun 1999 dan undang-undang no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi Daerah dan desantralisasi fiscal dalam perkembangannya kebijakan ini dan diperbarui dengan di keluarkannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian di revisi kembali menjadi undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Kedua undang-undang ini mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah Daerah (PEMDA) karena PEMDA memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, DPRD dan PEMDA harus berupaya secara nyata dan struktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing Daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran Daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas public. Dengan demikian APBD harus di rancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan agar dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan Ikepuasan public, sehingga pembagunan Daerah yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Dalam penelitian Arnita (2013) yang menjelaskan bahwa tingkat Anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten pinrang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun belum tercapai karena target yang telah direalisasikan lebih besar dari pada yang terealisasi, itu disebabkan, itu, disebabkan karena banyaknya penunggakan terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan sesuai dengan hasil bahwa tingkat pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir 2007-2011 menunjukkan bahwa rata-rata mengalami perbaikan ekonomi masyarakat karna setiap tahun mengalami peningkatan.

Membahas APBD khususnya di Kabupaten Enrekang dan dengan melihat informasi yang beredar tentang devicit anggaran yang dialami pemerintah Kabupaten Enrekang membuat tanda Tanya besar apakah factor tersebut diakibatkan oleh perencanaan yang kurang matang atau adanya suatu kebutuhan yang memaksa pemerintah kabupaten Enrekang didalam Pengelolaan Anggaran Daerah sehingga hal ini berimbas kekurang optimalnnya sector yang mendukung Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian yang digunakan 3 bulan yaitu : Januari-Maret 2021. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Regresi ini berganda adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabe dependen.

$$Y = a + X_1B_1 + X_2b_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X1 = Realisasi Anggaran

X2 = Realisasi Belanja Daerah

HASIL PENELITIAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD di tetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapat dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembagunan, otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.
2. Kebijakan keuangan daerah sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian misinya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan dengan melakukan optimasi penerimaan sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan Ekonomi menjadi variabel bebas dan variabel terkait yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) berpengaruh secara signifikan. Maka hipotesis 3 diterima.

1. Pengaruh Realisasi Anggaran berdasarkan hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa pengaruh realisasi anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang.
2. Pendapatan dan Belanja, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa pendapatan belanja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten enrekang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan dan belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang.
3. Pertumbuhan Ekonomi, berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga diketahui bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten enrekang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis pembahasan tentang Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan :

1. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan pola hubungan bersifat instruktif yaitu pemerintah daerah Kabupaten Enrekang belum mampu membiayai sendiri pemerintahannya secara finansial. Rendahnya kemandirian Kabupaten Enrekang disebabkan rendahnya sumber-sumber pendapatan seperti; pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang sah, yang menjadi sumber utama pendapatan daerah.
2. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Enrekang selama tiga tahun terakhir 2016-2020 keuangan daerah menunjukkan dengan ketergantungan sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap penerimaan dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut disebabkan karena dana perimbangan yang diterima setiap tahunnya mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi tumpuan pengeluaran daerah itu sendiri.

3. Berdasarkan hasil perhitungan regresi dikemukakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan pemerintah Kabupaten Enrekang cukup mampu dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pendapatan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang harus memperhatikan kemampuan penyelenggaraan APBD pada setiap instansi pemerintah Kabupaten Enrekang, sehingga proses pembangunan dapat berjalan baik.
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita ,2003, Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang,umpar,parepare
- Badric Sireger,2015,Akuntansi Sektor Publik,Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen,Yogyakarta
- Dewi Puspita Sari,2013,Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kab.Pinrang,UMPAR
- Indra Sosial,Yolamalinda,Rain Hidayat,2010,Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di Sumatra Barat
- Albar, Muh Azis.2019.Dalam Tribunenrekang.Diakses Tanggal 18 No Vember 2019 Pukul 14:45
- Bastia, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi. Revisi: Jakarta. Salemba Empat
- Permendagri No.13Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No.33. Tahun. 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: PT.Granedia Pustaka.
- UU No. 32 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: PT.Granedia Pustaka.